

***E-Government di Kabupaten Gowa
(Studi pada Diskominfo Kabupaten Gowa)***

***E-Government in Gowa District
(Study on Diskominfo at Gowa District)***

Sri Dewi Mulyana Nur Tadrin¹, Sulmiah^{2*}

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email : Sulmiah@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui e-Government di Kabupaten Gowa serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan e-Government di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-Government di Kabupaten Gowa (Studi Pada Diskominfo Kabupaten Gowa) berdasarkan empat indikator yang harus dicapai dalam penyelenggaraan e-Government yaitu: efisiensi telah baik, efektifitas kurang baik, transparansi baik dan akuntabilitas kurang baik. Pada indikator efektifitas dikatakan kurang baik karena terdapatnya kendala dalam hal anggaran yang menyebabkan tidak tercapainya perencanaan sesuai dengan tujuan. Sedangkan pada indikator akuntabilitas data yang dapat dijamin keakuratan oleh Diskominfo hanya pada website Humas Gowa tidak pada kebenaran dari pelaporan pelaporan oleh tiap SKPD yang di masukkan ke dalam website yang tersedia.

Kata Kunci: *e-Government; Pelayanan Publik*

ABSTRACT

This study aims to determine e-Government in Gowa Regency as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of e-Government in Gowa Regency. This study uses a qualitative approach. The data collection used was interview, documentation, and observation. The data obtained from the research results were processed using an interactive analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that e-Government in Gowa Regency (Study at Diskominfo Gowa Regency) is based on four indicators that must be achieved in the implementation of e-Government, namely: efficiency is good, effectiveness is not good, transparency is good and accountability is not good. The effectiveness indicator is said to be not good because there are constraints in terms of the budget which causes the planning to not be achieved in accordance with the objectives. Meanwhile, on the data accountability indicators, the accuracy of which can be guaranteed by Diskominfo is only on the Gowa Public Relations website, not on the correctness of the reporting by each SKPD that is entered into the website provided.

Keywords: *e-Government, Public service*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan aplikasi telah memengaruhi setiap aspek masyarakat.

Seperti contohnya layanan sektor publik, toko online, layanan pendidikan berbasis teknologi, koran internet, dan layanan

penyiaran, semuanya telah terpengaruh oleh teknologi informasi. Fenomena ini disebut Revolusi Informasi atau Revolusi Technology. Revolusi informasi merupakan proses transformasi dimana terjadi perubahan yang dihasilkan teknologi informasi. Revolusi informasi memiliki pengaruh pada setiap aspek masyarakat dan juga di lingkungan pemerintah dikenal dengan istilah e-Government. Komputer dan teknologi berbasis web secara efektif dapat memecahkan berbagai masalah pemerintahan yang ada dibanding cara lain. Adanya perkembangan teknologi kini mampu mengolah data dengan cepat dan memungkinkan komunikasi informasi berjalan lebih efektif. (Indrajit, 2016).

Di Korea, istilah "e-Government" pertama kali secara resmi muncul di laporan kebijakan pemerintah pada tahun 1996. Pada tahun 1995 Pemerintah Korea mendirikan "ICT (Information and Communication Technology) Promosi Act" untuk mempercepat informasi, dan tahun berikutnya diusulkan 10 tugas prioritas. Yang pertama adalah proyek e-Government yang menganggap sebagai pelanggan. Tujuan pemerintah adalah untuk melayani dan bermanfaat bagi masyarakat. Konsep dari e-Government adalah untuk melayani masyarakat melalui pelayanan publik yang sangat maju dan berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini

e-Government dapat secara efektif membuat reformasi dalam lingkup pemerintah dan penyampaian layanan publik melalui teknologi informasi. Hal ini penting untuk mengamankan

efisiensi administrasi secara maksimal dan mengembangkan interface dalam memberikan informasi dan berbagai pelayanan publik kapan saja dan di mana saja (Indrayani, 2016).

Penyelenggaraan proses kerja pemerintahan menggunakan teknologi informasi atau biasa disebut dengan e-Government yang merupakan proses pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat bantu kerja pemerintahan secara efisien. Didalam e-Government terdapat dua hal yang utama yaitu yang pertama adalah penggunaan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat bantu dan pemanfaatan yang menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien dan mudah. Dalam pelaksanaan e-Government, masyarakat dapat berhubungan langsung dengan bagian pelayanan, berinteraksi melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, atau dapat mengirim surat. Jadi, e-Government sesuai dengan fungsinya, merupakan penggunaan TIK yang dapat meningkatkan interaksi antara pemerintah dan pihak-pihak lain ((Diskominfo Kab. Gowa), 2017)

E-Government menjadi inovasi dalam peningkatan kualitas layanan pemerintahan, melalui pelaksanaan yang lebih efisiensi, pelayanan baru, serta meningkatkan partisipasi warga. Dengan kata lain e-Government melalui peningkatan tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu pelayanan pemerintah akan menjadi lebih transparan, mudah dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat diantisipasi dan

pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien (Indrajit, 2016).

Beberapa manfaat dari e-Government, yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu: Pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi yang disediakan oleh pemerintah tidak harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Serta informasi dari pemerintah dapat diakses dari kantor atau rumah tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

Terdapat 13 aplikasi yang digunakan oleh Kabupaten Gowa. Dari ke-13 Aplikasi Pelayanan Online yang digunakan oleh Kabupaten Gowa tersebut, masih terdapat beberapa aplikasi pelayanan untuk masyarakat yang belum digunakan secara maksimal yaitu SKP dan Whistleblowing System. Sedangkan aplikasi SP4N LAPOR, SiCANTIK, OSS, SiRUP dan SiMAYA merupakan aplikasi yang bukan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Sedangkan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa itu sendiri yaitu diantaranya LPSE, SKP, MySIMPEG, E-SAKIP, E-KATALOG, Humas Gowa, JDIH Kabupaten Gowa, dan Whistleblowing System Kabupaten Gowa. Kekurangan lainnya isi informasi yang terdapat didalam aplikasi masih belum diperbaharui sesuai kondisi pemerintahan Kabupaten Gowa saat ini. Aplikasi Pelayanan Online ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya publikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa, hal itulah yang menyebabkan

kurang maksimalnya aplikasi tersebut digunakan.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa merupakan lembaga teknis pemerintah daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam (Gowa, 2017) tertulis bahwa, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai unit/kesatuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun Visi dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yaitu: “Terwujudnya Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Berbasis Teknologi Menuju Masyarakat Kabupaten Gowa Yang Berdaya Saing Dengan Tatat Kelola Pemerintah Yang Baik”. Maka dari itu Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa bertujuan untuk mewujudkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan berbasis online, juga peningkatan pengamanan informasi dan komunikasi pemerintah yang tidak lain merupakan pelaksanaan suatu e-Government.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif karena pendekatan kualitatif deskriptif ini memperoleh informasi dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, catatan memo dan dokumen

resmi lainnya (Moleong, 2004).

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi ini, karena fokus pelaksanaan dari *e-Government* itu sendiri dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Diskominfo Kabupaten Gowa memiliki visi yang di mana untuk mengembangkan pelaksanaan *e-Government*.

Selain itu untuk melengkapi data maka digunakan pedoman wawancara dan pedoman pengamatan (kamera/video) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi, pengecekan keabsahan data (Arikunto, 2006). Metode- metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan dibagian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait *e-Government* di Kabupaten Gowa (Studi pada Diskominfo Kabupaten Gowa, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan. Observasi dengan mengamati secara langsung apa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa pengambilan gambar dan merekam audio sebagai penunjang dalam penelitian agar lebih jelas.

Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian (Diskominfo) Kabupaten Gowa yang beralamat di Jl. Andi Mallombassarung No. 72 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Adapun informan dalam proses wawancara yang dilakukan adalah Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi, Kepala Seksi Layanan *e-Government* dan Pengembangan Aplikasi, dan Pegawai pada Bidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait *e-Government* di Kabupaten Gowa (Studi Pada Diskominfo Kabupaten Gowa) yang dinilai berdasarkan fokus penelitian yaitu indikator mana yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan *e-Government* hingga saat ini berdasarkan empat indikator menurut (Azkiya, 2018) yaitu Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas.

1. Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang terkendali untuk memberikan dan menghasilkan pelayanan dari pemerintahan kepada masyarakat dengan mempermudah dan mengurangi kesulitan masyarakat dalam memperoleh pelayanan (Kurnia et al., 2017). Proses pelaksanaan kegiatan dapat disebut efisien jika dapat menghasilkan kerja atau pencapaian dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit.

Mardiasmo (2009) dalam (Sumenge, 2019). Efisiensi, adalah ukuran keberhasilan keseimbangan antara kemudahan, kecepatan, penghematan waktu dan penghematan

pembiayaan (Hayati Saingura & Purnomo, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah ukuran keberhasilan keseimbangan antara penggunaan waktu, biaya serta penggunaan sumber daya lainnya yang lebih sedikit sehingga dapat memudahkan proses pelaksanaan pekerjaan.

E-Government bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan Publik. Kabupaten Gowa telah menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Dengan adanya aplikasi dan website dapat memudahkan pekerjaan ASN seperti tersedianya data kepegawaian dan data keuangan yang dapat membantu dalam hal pelaporan maupun pengambilan putusan. Selain itu dapat meningkatkan pelayanan publik terkait pengurusan dokumen-dokumen masyarakat seperti pembuatan KTP. Memberikan pelayanan publik secara online dapat memudahkan masyarakat dari segi waktu dan tenaga.

E-Government memiliki manfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat. Dengan adanya aplikasi atau website dapat memudahkan ASN dalam memperoleh data secara online tanpa harus memperoleh secara manual atau datang ke tempat yang ingin diambil datanya. Seperti data pajak yang ingin diketahui oleh Bapak Bupati Kabupaten Gowa, data tersebut dapat di akses melalui aplikasi atau website yang tersedia tanpa harus berkunjung ke instansi terkait untuk memperoleh data. Selain itu *e-Government* juga bermanfaat bagi masyarakat, yaitu

dengan memudahkan dalam memperoleh informasi dan pengurusan dokumen-dokumen Negara atau surat perizinan yang dapat dibuat melalui Smartphone maupun komputer. Dengan adanya pengurusan secara online, masyarakat dan ASN dapat mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transport untuk datang ke instansi terkait.

Penggunaan aplikasi dan website perlu dilakukan pengembangan atau perbaharuan agar aplikasi tersebut menjadi lebih baik. Namun dalam pengembangannya tentu menggunakan banyak biaya dalam meningkatkan kualitas aplikasi dan website tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Government* sudah efisien karena dapat memudahkan masyarakat maupun ASN dalam memperoleh informasi dan mengurus dokumen-dokumen yang dapat dibuat melalui Smartphone dan komputer. masyarakat dan ASN dapat menghemat waktu, tenaga, maupun biaya karena semuanya dapat diakses secara online.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara pengeluaran dengan perencanaan atau tujuan yang harus dicapai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mencapai tujuan (Mardiasmo 2009) dalam (Sumenge, 2019).

Efektifitas merupakan ukuran dari tingkat pengeluaran untuk mendapatkan hasil pencapaian yang sesuai dengan perencanaan yang

dibuat sebelumnya (Bungkaes et al., 2013). Pelayanan cepat dan keterbukaan dalam memperoleh informasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dan menjadi tujuan dari *e-Government*.

Tujuan dari *e-Government* adalah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan memudahkan ASN dalam proses kerjanya. Untuk meningkatkan pelayanan yang baik, pemerintah Kabupaten Gowa membuat berbagai aplikasi yang dapat di akses melalui Smartphone atau komputer. Hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang diperoleh pemerintah Kabupaten Gowa karena sudah memiliki beberapa aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dan ASN dalam memperoleh informasi dan mengurus dokumen.

Efektifitas adalah pengukuran perbandingan antara apa yang direncanakan dengan hasil pencapaian. Salah satu perencanaan dari *e-Government* yaitu untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana segala kebutuhan ASN dan masyarakat dapat diakses melalui aplikasi atau website. Dapat dikatakan efektif jika perencanaan sesuai dengan hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil wawancara perencanaan dari segi anggaran atau biaya belum sesuai dengan hasil yang diharapkan karena segala kebutuhan dari pengadaan infrastruktur baik dari pengadaan server dan jaringan membutuhkan biaya yang besar sedangkan dalam satu tahun terakhir ini terjadi pengurangan anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas *e-Government* tidak tercapai karena adanya perencanaan yang tidak tercapai dari segi anggaran atau biaya karena dalam pengadaan dan pengembangan aplikasi dan website membutuhkan anggaran yang besar namun anggaran tersebut juga menjadi kendala disebabkan terjadi pengurangan anggaran karena adanya Covid-19.

3. Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan *e-Government* dapat diartikan sebagai penyelenggaraan system elektronik yang dilakukan secara terbuka, terutama pada pelayanan publik (Kurnia et al., 2017). Transparansi merupakan keterbukaan akses yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari pemerintah baik itu berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggung jawaban (Gunawan, 2015). Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktifitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan (Mardiasmo 2002) dalam (Gunawan, 2015). Transparansi merupakan kebebasan yang diberikan kepada tiap orang dalam mengaksesan untuk memperoleh informasi yang terpercaya dan akurat.

Pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Gowa bertujuan untuk memudahkan dalam proses kegiatan dan kerja pemerintah. Selain itu, dengan adanya *e-Government* diharapkan pemerintah Kabupaten Gowa dapat lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Aplikasi SIRUP merupakan salah satu bentuk transparansi dari *e-Government* yang dimana aplikasi ini memuat tentang laporan keuangan, realisasi, rancangan kerja, dan pengadaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya kemudahan akses maka masyarakat dapat mengetahui mengenai proses dan tindakan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Gowa.

Keterbukaan dalam memberikan informasi tentu memiliki batasan-batasan informasi apa saja yang dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masalah atau kendala yang dialami tidak diketahui oleh masyarakat dan sebaik mungkin diselesaikan oleh pihak internal. Berdasarkan hasil wawancara bahwa memberikan informasi memiliki batasan yang telah diatur oleh pemerintah. SKPD juga memiliki kewenangan dalam memberikan suatu informasi mengenai instansinya kepada Diskominfo. Informasi yang diberikan sebatas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Gowa yang diunggah di Web Humas Gowa dimana itu merupakan informasi setiap saat dan berkala, adapun informasi yang boleh dipublikasikan yaitu laporan laporan realisasi, rancangan kerja, dan pengadaan, hingga informasi lainnya seperti mengenai jumlah penduduk dan jumlah koperasi. Dan informasi yang tidak boleh dipublikasikan diantaranya informasi dari SKPD mengenai daftar username, password website yang sifatnya rahasia, nama pegawai, identitas pegawai, dokumentasi dokumentasi pengadaan barang, data

korban kekerasan, data untuk perlindungan anak, semua itu informasi yang tidak boleh dipublikasikan.

Pemerintah Kabupaten Gowa juga memberikan pengenalan berupa informasi terkait tata cara penggunaan dan manfaat aplikasi dan website yang dimiliki. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pemerintah Kabupaten Gowa telah memiliki aplikasi yang memuat informasi seputar kegiatan pemerintah sebagai bentuk transparansi. Bentuk sosialisasi yang dijalankan yaitu dengan memperkenalkan aplikasi dan website yang dimiliki melalui akun media sosial tiap SKPD. Selain itu, pemerintah juga menggunakan radio dan iklan sebagai bentuk sosialisasi aplikasi dan website.

Selain memperkenalkan kepada masyarakat terkait informasi tentang aplikasi dan website yang dimiliki, pemerintah juga telah melakukan pembaharuan pada aplikasi. Pembaharuan ini bertujuan agar informasi yang diberikan sesuai waktu atau biasa disebut up to date dan aplikasi website dapat terus ditingkatkan sistemnya agar semakin baik kedepannya. Dengan kata lain aplikasi yang berjalan diharapkan dapat terus diperbaharui informasinya agar masyarakat dapat mengetahui perubahan yang terjadi di Kabupaten Gowa.

Jika merujuk pada indikator transparansi dari Azkiya, dapat disimpulkan bahwa transparansi *e-Government* di Kabupaten Gowa sudah tercapai karena pemerintah Kabupaten Gowa telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh

informasi berupa laporan keuangan, realisasi, rancangan kerja, dan pengadaan dalam aplikasi SIRUP. Masyarakat juga dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dijalankan pemerintah Kabupaten Gowa pada website Humas Gowa.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pemberian jawaban kepada yang berwenang atas suatu tindakan dari seseorang atau kelompok terhadap publik dalam suatu organisasi (Syahrudin 2003) dalam (Gunawan, 2015). Pasal 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah ketentuan setiap kegiatan serta hasilnya juga penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Gunawan, 2015). Akuntabilitas merupakan suatu kejelasan pertanggung jawaban pada setiap keputusan dan program yang telah dilaksanakan (Hayati Saingura & Purnomo, 2018).

Penggunaan konsep *e-Government* dilihat apabila pemerintahan telah melaksanakan pertanggung jawaban dengan didukung sistem media yang menyediakan website-website untuk melampirkan akuntabilitas tersebut maka pemerintahan bisa dikatakan transparan dan terbuka untuk informasi tata kelolanya.

Informasi mengenai laporan pertanggungjawaban yang diberikan dari SKPD lain dapat dikatakan akuntabel jika informasinya sudah

benar dan tervalidasi datanya. Berdasarkan hasil wawancara, Diskominfo tidak memiliki tanggung jawab dalam memeriksa kebenaran data yang di berikan oleh SKPD lain untuk di unggah ke aplikasi atau website karena Diskominfo hanya penyedia wadah yang berisi informasi informasi yang dapat diakses kebenarannya. Diskominfo hanya dapat menjamin keakuratan datanya pada website Humas Gowa karena website tersebut bagian dari Diskominfo yang mengelolanya. Namun pada website Humas Gowa tidak memuat laporan pertanggungjawaban, hanya berisi kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Gowa.

Informasi yang diunggah oleh aplikasi atau website dari Diskominfo perlu diketahui kebenarannya karena informasi merupakan hal yang penting dan perlu dipertanggungjawabkan karena Diskominfo yang memberikan informasi ke masyarakat.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Gowa yaitu dengan adanya 3 SDM sebagai Programmer dari Diskominfo yang memiliki potensial untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi yang dimiliki Kabupaten Gowa. Sedangkan faktor penghambat yang paling utama yaitu terkait anggaran karena anggaran yang kurang sehingga tidak tercapainya perencanaan dari segi anggaran atau biaya karena dalam pengadaan dan pengembangan aplikasi dan website membutuhkan anggaran yang besar. Adapun data pada tahun 2020 anggaran

yang dibutuhkan pada program pengembangan, informasi dan media massa yaitu 23,3% dari keseluruhan anggaran kegiatan Diskominfo Kabupaten Gowa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *e-Government* di Kabupaten Gowa (Studi pada Diskominfo Kabupaten Gowa) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *E-Government* di Kabupaten Gowa (Studi Pada Diskominfo Kabupaten Gowa) saat ini dapat dikatakan memenuhi pencapaian berdasarkan empat indikator yang harus dicapai dalam menjalankan *e-Government* yaitu efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dua dari empat indikator tersebut dapat dikatakan kurang baik yaitu efektivitas dan akuntabilitas.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Gowa yaitu dengan adanya 3 SDM sebagai Programmer dari Diskominfo yang memiliki potensial untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi yang dimiliki Kabupaten Gowa. Sedangkan faktor penghambat yang paling utama yaitu terkait anggaran karena anggaran yang kurang sehingga tidak tercapainya perencanaan dari segi anggaran atau biaya karena dalam pengadaan dan pengembangan aplikasi dan website membutuhkan anggaran yang besar. Adapun data pada tahun 2020 anggaran yang dibutuhkan pada program pengembangan, informasi dan media massa yaitu 23,3% dari keseluruhan anggaran kegiatan Diskominfo Kabupaten Gowa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang dapat peneliti sampaikan yaitu pemerintah Kabupaten Gowa perlu mempertimbangkan dalam hal perencanaan agar kedepannya tidak perlu membuat banyak perencanaan dan fokus pada satu perencanaan saja sehingga dalam hal penganggaran juga tidak memerlukan biaya yang besar dan dapat tercapai sesuai tujuan. Dan dalam pelaksanaan akuntabilitas dapat dilakukan kordinasi pada tiap tiap SKPD yang menggunakan aplikasi agar informasi mengenai aplikasi maupun apa yang termuat dalam aplikasi tersebut juga diketahui oleh penyedia aplikasi dalam hal ini adalah Diskominfo.

DAFTAR PUSTAKA

- (Diskominfo Kab. Gowa), K. G. (2017). *Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gowa 2017 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Gowa*. 1–107.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. 1998, 1–11.
- Azkiya, H. (2018). Penerapan E-Goverment dalam peningkatan pelayanan publik. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Azmi, I. F., & Asmarianti. (2019). Studi kebijakan *e-Government* di indonesia: membangun *e-Government* yang berorientasi pada kualitas layanan. *Seminar Nasional Sitem Informasi Dan Teknik Informatika*, 889–896.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan

- Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal "ACTA DIURNA" Edisi April 2013, welfare*, 1–23.
- Febriani, R. (2016). Gambaran *e-Government* di Indonesia yang Bersistem Desentralisasi Ditinjau dari Performa Situs Web Pemerintah Daerah. *Nirmana*, 16(1), 64–72. <https://doi.org/10.9744/nirmana.16.1.64-72>
- Gardner, E. S. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. 5, 63–65.
- Gowa, P. (2017). *Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) Lingkup Pemerintah Daerah*.
- Gunawan, D. R. (2015). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Akuntansi*, 3(1), 103–111.
- Hayati Saingura, & Purnomo, E. P. (2018). *Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta*. December, 1–23.
- Hidayat, A., Alsyah, S., & Weningsih, S. (2013). Implementasi *E-Government* dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Indonesia, P. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia*.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government*.
- Indrayani, E. (Institut P. D. N. (2016). *E-Government (Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia)*. 022, 2014.
- Kharisma, R. S., Setyowati, E., & Sukanto. (2003). Efektivitas Penyelenggaraan *E-Government* Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. *Jap*, 3(12), 2145–2151.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). *E-Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.170-181>
- Ramdani, E. M. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan *E-Government* di Tingkat Kelurahan. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 31–48. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i1.520>
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi *E-Government System* Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia. *Jeam*, XI(1), 1–19.
- Sumenge, A. S. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>
- Wijaya, A. (2015). *Penerapan E-Government Di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional ... (Issue 3)*. <http://lib.unnes.ac.id/21679/>
- Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan *E-Government* Di Indonesia: Analisis Website. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2018*(Sentika), 329–336.